

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja Anggaran DAK pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil atau dikemukakan, antara lain :

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dengan membandingkan (realisasi anggaran) yaitu serapan kegiatan dan (target anggaran) yaitu dana anggara, maka hasilnya adalah prestasi kinerja anggaran pada Dana Alokasi Khusus adalah efektif. Dalam tiga tahun anggaran jumlah anggaran untuk DAK rata-rata serapan pada DAK Dinas Pendidikan Timor Tengah Utara adalah sangat efektif.
3. Rasio Efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dengan membandingkan antara input (raelisasi belanja) dan output (realisasi anggaran) diperoleh tingkat efisiensi Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah terealisasi bahwa prestasi kinerja anggaran termasuk pada kriteria yang sangat efisien dengan tingkat prestasi sampai dengan atau di bawah 10%

4. Rasio Pertumbuhan kemampuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya terbukti pada penghitungan rasio pertumbuhan pendapatan, sedangkan Rasio pertumbuhan belanja mengalami penurunan.

6.2 Saran

- a. Sesuai dengan prinsip anggaran kinerja, bahwa untuk melihat kinerja kebijakan pemerintah berkaitan dengan pendidikan harus memperhatikan input, output, dan outcome namun dalam penelitian ini hanya sampai mengetahui outcome karena peneliti hanya menggunakan pada Dana Alokasi Khusus saja dan belum Dana Alokasi Umum diharapkan peneliti lain ada yang mampu memberikan tambahan variabel penelitian.
- b. Perlu peningkatan kinerja pada (belanja), khususnya belanja Tunjangan profesi Guru yang mengalami keterlambatan sehingga diharapkan dapat tepat waktu.
- c. Dalam menentukan target, perlu lebih teliti menulis Daftar Penerima Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, badu (2013). *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta: Andi Offset
- Ekawarna, et al. (2016). *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi*. Jurnah Cakrawala Akuntansi.
- Fachrulrazi (2016). *Anggaran Di Aceh Tinggi Untuk Belanja Pegawai, Minim Untuk Publik*. Melalui: <https://acehsatu.com/fachrul-razi-mip-anggaran-di-aceh-tinggi-untukbelanja-pegawai-minim-untuk-publik/>.
- Fahmi, irham (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta
- Halikinnor (2017) *Anggaran Tak Terserap Berarti Kinerja Rendah*. Melalui: <http://www.borneonews.co.id/berita/71370-anggaran-tak-terserap-berarti-kinerja-rendah>
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikhlas, Sustiyowati, Eva, Abdullah. 2011. *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang*. Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia. 1 (2): 1-11.
- Kintan Sisiliawati Prita Indriani (2020) pernah menganalisis pengaruh belanja pegawai, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja barang dan jasa, kemandirian daerah dan ketergantungan fiskal terhadap belanja moda.” Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako.
- Kusumah, et al. (2016) *Analisis Anggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Studi Kasus Pemerintah Provinsi Bengkulu*.
- Karlina. Laksmiarti, T. Kusnali, A. 2017. *Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 20 (2), 73–81
- Mahsun, Mohammad (2012) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi
- Nuryadin, D. Sri, S. 2017. *Analisis dan Evaluasi dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18 (1), 63-68
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pelealu, Nana Sudjana, Andreas. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. Jurnal EMBA. 4 (1): 1189-1197.
- Rahmawati, Ni Ketut Erna & Putra, I Wayan (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012*, E-Jurnal
- Sujarweni (2015) “Metodologi Penelitian” Penerbit pustaka baru press: Yogyakarta.
- Sukarna, Foni. Subekan, Ari. Rengga, Aloysius. 2012. *Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003*. Jurnal Undip. 7 (2): 1-11.
- Susanto, E dan Marhamah; 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating di Provinsi Jawa Timur*.
- Uun Ainul Yaqin¹, Titiek Herwanti² (2018), *Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah* Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 1(2), 2018, halaman 123-136
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK)*